

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang perekonomiannya terus bertumbuh. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus menerus tentunya akan meningkatkan tumbuhnya suatu bisnis sehingga bertambah banyak dari tahun ke tahun dan pada akhirnya membuat masing-masing perusahaan memunculkan yang namanya ‘persaingan bisnis’, dimana salah satu bentuk persaingan bisnis yang akan dilakukan antar perusahaan adalah dengan meningkatkan pelayanan. Dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk menghadapi persaingan tersebut tentunya dilakukan dengan perbaikan pada operasional perusahaan sehingga organisasi dapat berjalan efisien dan efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peralatan yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam memaksimalkan pelayanannya dengan menambahkan aset tetap (*fixed asset*) yang berguna untuk kegiatan sehari-hari pada operasional bisnis perusahaan.

Menurut Oxtaviana & Khusbandiyah (2016), tujuan dimilikinya aset tetap pada perusahaan adalah untuk dapat digunakan dalam kegiatan produksi, untuk penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Penggunaan aset tetap tersebut pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam hal membantu kelancaran operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan dapat bersaing antar perusahaan.

Perusahaan dalam mendapatkan aset tetap memiliki beberapa pilihan yakni membeli aset tetap tersebut secara langsung atau mengadakan perjanjian sewa guna usaha untuk memperoleh pengelolaan dan manfaat dari suatu aset (Saing & Firmansyah, 2021). Jika perusahaan memilih untuk membeli aset tersebut secara langsung maka perusahaan tersebut akan memiliki hak untuk mengelola aset tersebut secara penuh dan leluasa penggunaannya dan tidak ada batasan tetapi harus mempertimbangkan biaya yang sangat besar yang timbul dari kepemilikan aset tersebut dan selain biaya tersebut perusahaan juga akan mempertimbangkan biaya-biaya lain seperti biaya penyusutan, biaya

pemeliharaan dan modal lebih untuk membeli aset tersebut, sehingga perusahaan menggunakan alternatif lain yakni perusahaan memilih untuk mengadakan perjanjian sewa guna usaha atau menyewa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat peningkatan kegiatan perusahaan pembiayaan dibidang sewa di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2015. Dimana terdapat peningkatan di tahun 2019 sebesar 20,05% pada aset dan 35,85% pada ekuitas perusahaan pembiayaan. Peningkatan tersebut menandakan bahwa kegiatan sewa di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

Sejalan dengan peningkatan kegiatan sewa di Indonesia, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengatur terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa sehingga pihak yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan mendapatkan informasi yang relevan dan tidak menyesatkan. Dimana sebelum tahun 2020, standar yang mengatur kegiatan sewa di Indonesia diatur didalam PSAK 30 terkait dengan sewa yang diadopsi penuh dari IAS 17. Standar ini memberikan pihak *lessor* (pesewa) maupun *lessee* (penyewa) alternatif untuk mengklasifikasikan kegiatan sewanya apakah termasuk kedalam sewa operasi (*operating lease*) atau sewa pembiayaan (*capital lease*) dan melakukan pencatatan yang berbeda atas kedua jenis sewa tersebut.

Akuntansi pada sewa operasi, *lessee* hanya akan mencatat biaya sewa pada laporan keuangan dan tidak mencatat aset dan kewajiban sewa pada laporan posisi keuangannya disebut dengan istilah “*off-balance-sheet*”. Sedangkan jika dengan menggunakan sewa pembiayaan, *lessee* akan mencatat aset dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangannya serta depresiasi dan beban keuangan pada laporan laba rugi disebut dengan istilah “*on-balance-sheet*”.

Akibat adanya pilihan sewa operasi menyebabkan kinerja keuangan akan lebih baik jika dibandingkan dengan sewa pembiayaan dikarenakan jika kinerja keuangan pada perusahaan diukur dengan rasio *leverage* dan rasio efisien justru akan menghasilkan rasio *leverage* yang tinggi dan rasio efisien yang rendah karena sewa pembiayaan akan memunculkan aset dan liabilitas sewa beserta dengan pencatatan biaya penyusutan dan beban bunga pada laporan laba rugi (Giner & Pardo, 2018).

Sewa operasi yang bersifat “*off-balance-sheet*” membuat akuntansi sewa memiliki sejarah kontroversial yang sangat panjang dimana hal tersebut membuat banyaknya protes publik yang menuntut untuk peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dimana hal tersebut akan menyulitkan pengguna laporan keuangan untuk dapat melihat gambaran yang akurat tentang aset dan liabilitas sewa perusahaan serta sulit untuk memperkirakan jumlah yang “*off-balance-sheet*”. Dan tidak adanya informasi tentang sewa dalam laporan posisi keuangan berarti investor dan pihak eksternal lainnya tidak akan memiliki gambaran lengkap tentang sewa dalam laporan posisi keuangan *lessee* dan tidak dapat membuat perbandingan keuangan antar *lessee* karena perbedaan perlakuan akuntansi sewa antara sewa operasi dan sewa pembiayaan (Susanti et al., 2021).

Salah satu contoh kasus terkait dengan kegiatan “*off-balance-sheet*” pada pemanfaatan sewa operasi di perusahaan Indonesia ialah PT Garuda Indonesia (GIAA). Diberitakan melalui media online KONTAN, Rabu (17/6/2015), GIAA melakukan pembelian pesawat besar-besaran di Paris Air Show, dengan banyak pesawat baru yang dibeli ialah 90 pesawat dimana sebanyak 72 item diantara pesawat baru tersebut digunakan dengan menggunakan skema *operating lease* sedangkan sisanya sebanyak 18 item pada pesawat baru tersebut menggunakan skema sewa pembiayaan. Pesawat yang telah dibeli tersebut selanjutnya akan di jual kembali oleh GIAA dan kemudian GIAA akan menyewa kembali dari *lessor* sehingga GIAA tidak mencatat aset ataupun liabilitas sewa atas pengadaan aset pada laporan posisi keuangannya sehingga rasio keuangan pada perusahaan tersebut tetap terjaga.

Salah satu tujuan IASB (*International Accounting Standards Board*) adalah untuk memastikan bahwa untuk mengambil keputusan yang bermanfaat, investor saat ini dan calon investor harus diberikan informasi yang berkualitas tinggi, transparan dan dapat dibandingkan. Sesuai dengan tujuan tersebut maka pada Januari 2016, IASB mengeluarkan standar akuntansi baru IFRS 16 “Sewa” yang menetapkan aturan baru untuk pengakuan, pengukuran (penilaian) dan pengungkapan sewa dalam laporan keuangan. Dengan penerapan IFRS 16, IASB berharap untuk menghilangkan kekurangan transparansi. Sehingga solusi yang dipromosikan oleh IASB ialah untuk menghilangkan pendanaan diluar

laporan posisi keuangan adalah dengan berhenti membuat perbedaan antara sewa pembiayaan dan sewa operasi dan untuk mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan *lessee* semua kontrak sewa dengan beberapa pengecualian. Sehingga dengan diterapkannya IFRS 16 kualitas informasi yang diberikan kepada investor akan meningkat dan dapat melakukan analisis yang lebih lengkap atas posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IASB, 2016).

Penerapan IFRS 16 yang ditetapkan oleh IASB akan menjadi model akuntansi tunggal yang membahas terkait dengan transaksi sewa serta standar ini akan menggantikan IAS 17 “Sewa”. Sehingga, penetapan standar tersebut akan diikuti oleh berbagai negara di kancah International yang komitmen untuk melakukan penerapan IFRS penuh. Dan, salah satu negara yang memiliki komitmen tersebut adalah Indonesia, sehingga pada bulan September 2017 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan PSAK 73 “Sewa”. Dan standar tersebut berlaku efektif pada 1 Januari 2020, perusahaan diperkenankan untuk melakukan penerapan dini dengan syarat juga harus menerapkan PSAK 72 terkait dengan “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”. Penerapan PSAK 73 akan menjadi standar akuntansi tunggal yang menjadi pedoman bagi perusahaan di Indonesia terkait dengan hak penggunaan dan liabilitas pada transaksi sewa.

Penerapan PSAK 73 mengharuskan *lessee* mengungkapkan aset hak guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan. Oleh karena itu setelah penerapan PSAK 73 Sewa, tidak ada lagi dua metode akuntansi bagi penyewa (*lessee*) yakni sewa operasi atau sewa pembiayaan, karena hampir semua sewa akan dicatat sebagai sewa pembiayaan melalui perspektif *lessee*. Namun terdapat pengecualian bagi *lessee* jika tetap dapat mengidentifikasi sewanya sebagai sewa operasi (*operating lease*) yakni jika masa sewa memiliki jangka waktu pendek (12 bulan atau kurang) atau nilai aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah yakni seperti laptop, peralatan kantor, dan telepon. Penerapan PSAK 73 terutama akan memiliki konsekuensi pada *lessee* dibandingkan dengan *lessor* karena aturan saat ini yakni PSAK 73 untuk klasifikasi dan pengakuan kontrak sewa oleh *lessor* dipertahankan (sama seperti aturan standar sebelumnya).

Dampak penerapan PSAK 73 dirasakan untuk semua sektor tetapi dampaknya akan berbeda pada masing-masing sektor. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh PWC (2016), sektor yang paling terpengaruhi dengan adanya implementasi IFRS 16 ialah pada sektor retail yang digambarkan dari Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Dampak Implementasi IFRS 16

Industri	Rata-rata peningkatan pada akun Liabilitas	Rata-rata peningkatan pada EBITDA	Rata-rata peningkatan pada Rasio Leverage	Rata-rata penurunan pada Rasio Solvabilitas
Retail	98%	41%	1.3	13.3%
Maskapai Penerbangan	47%	33%	0.37	5.7%
Layanan Profesional	42%	15%	0.43	2.8%
Kesehatan	36%	24%	0.81	3.1%
Grosir	28%	17%	0.27	1.8%
Transportasi & Infrastruktur	24%	20%	0.31	6%
Hiburan	23%	15%	0.48	5.1%
Telekomunikasi	21%	8%	0.35	0.8%

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan riset (PWC, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Mashuri & Sari (2021), Öztürk (2016), dan Wong & Joshi (2015) sebelumnya telah melakukan penelitian terkait dengan dampak kapitalisasi sewa terhadap kinerja keuangan dimana kapitalisasi sewa diukur dengan menggunakan metode *constructive capitalization* yang dikembangkan Imhoff, *et al.*, (1991) dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa kapitalisasi sewa akan berdampak pada kinerja keuangan dimana DAR meningkat yang diakibatkan karena liabilitas meningkat, DER juga meningkat

yang diakibatkan karena nilai ekuitas yang menurun dan penurunan nilai ROA dan ROE.

Dampak dari implementasi kapitalisasi sewa juga dirasakan oleh PT Garuda Indonesia yang dilansir pada laman KONTAN, dikatakan PT Garuda Indonesia (GIAA) *technically* bangkrut. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoadmojo pada Selasa (12/11/2021). PT Garuda Indonesia mengalami kondisi ekuitas yang negatif sebesar US\$2,8 M atau sekitar Rp40 triliun per September 2021. Kondisi tersebut dikarenakan adanya penerapan PSAK 73 yang menyebabkan nilai liabilitas perusahaan meningkat 229 persen dimana per September 2021 nilai liabilitas GIAA sebesar 9,8 Miliar dollar AS, sedangkan asetnya hanya sebesar 6,9 miliar dollar AS sehingga liabilitas GIAA lebih besar dibandingkan dengan nilai asetnya. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan dengan kode saham GIAA itu dikatakan *technically* bangkrut. Dari total liabilitas sebanyak US\$6,35 miliar adalah liabilitas kepada *lessor*. Penerapan PSAK 73 tersebut menyebabkan penurunan ekuitas perusahaan yang semakin dalam kemudian diikuti dengan meningkatnya nilai liabilitas perusahaan yang semakin tinggi.

Penerapan kapitalisasi sewa pada PSAK 73 dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan. Konflik tersebut memberikan peluang untuk terjadinya praktik manajemen laba yang mungkin disebabkan oleh adanya perubahan penggunaan standar akuntansi. Manajemen laba penting untuk diteliti karena tentunya akan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perilaku manajemen dalam menyajikan laporan keuangan (Sari, 2019).

Laporan keuangan tentunya banyak digunakan oleh pemangku kepentingan seperti investor, pemasok, dan pemberi pinjaman untuk mengevaluasi kinerja sebuah perusahaan. Oleh karena itu, ada insentif bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan sampai batas tertentu dengan tujuan untuk memperindah laporan keuangan (Jansson et al., 2022). Salah satu caranya adalah melalui manajemen laba. Manajemen laba terjadi ketika penilaian manajer digunakan dalam laporan keuangan untuk tujuan penataan transaksi keuangan sehingga dapat mengubah laporan keuangan menjadi lebih baik akan tetapi dapat

menyesatkan *stakeholder* terkait dengan kondisi keuangan perusahaan apalagi dapat mempengaruhi keputusan atas suatu kontrak (Hedqvist et al., 2022).

Selanjutnya, manajemen laba dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yakni manajemen akrual (*accrual*) dan manipulasi aktivitas nyata (*riil*). Manajemen laba aktivitas nyata mencakup pergantian manajer struktur atau waktu operasi, investasi atau transaksi keuangan. Manajemen Akrual mengacu pada pilihan akuntansi yang digunakan untuk menyembunyikan gambaran sebenarnya dari kinerja ekonomi perusahaan. Pada penelitian ini akan memfokuskan praktik manajemen laba pada perspektif manajemen laba akrual. Yang dimana sesuai pada penjelasan diatas, praktik ini akan ditimbulkan karena adanya tawaran dari standar akuntansi. Jadi motivasi praktik ini lebih dikarenakan adanya peluang pada standar akuntansi seperti misalnya metode akuntansi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rudra & Bhattacharjee (2011), dimana penelitian tersebut dilakukan di India menghasilkan bahwa ketika perusahaan mengadopsi IFRS (*principle based*) tidak akan mengurangi praktik manajemen laba karena penggunaan IFRS lebih disukai oleh manajemen dalam hal tujuan untuk melakukan manajemen laba.

Temuan Giner & Pardo (2018), tentang bagaimana dampak negatif yang besar penerapan IFRS 16 Sewa akan memiliki profitabilitas yang rendah pada perusahaan yang bersangkutan, menyebabkan asumsi bahwa manajer oportunistik akan menggunakan manajemen laba peningkatan pendapatan, selain penataan kontrak sewa, juga untuk perbaikan kerusakan IFRS 16 Sewa.

Kemudian, Jansson et al. (2022), menjelaskan bagaimana pasar saham biasanya bereaksi keras terhadap perubahan negatif kecil yang tidak terduga dalam laba yang dilaporkan. Laba bersih tak terduga nol atau hasil positif yang kecil tidak menyebabkan reaksi positif yang signifikan di pasar saham. Pertunjukan tersebut merupakan sifat irasional dari pasar saham, dimana pasar saham akan bereaksi lebih kuat terhadap hasil negatif kecil daripada hasil positif yang kecil. Oleh karena itu, terdapat motivasi bagi manajemen untuk menerapkan manajemen laba untuk menghindari reaksi negatif yang kuat ini dengan melaporkan pendapatan meningkat. Perilaku tersebut dimotivasi karena

pentingnya untuk menandakan kestabilan keuangan ke pasar. Karena penerapan IFRS 16 Sewa akan berdampak negatif terhadap rasio profitabilitas maka mungkin implementasinya bisa menciptakan insentif untuk memanipulasi pendapatan keatas untuk meningkatkan rasio profitabilitas dan oleh karena itu akan menghindari reaksi negatif dari pasar saham (Giner & Pardo, 2018).

Tidak sejalan dengan penelitian Rudra & Bhattacharjee (2011), Giner & Pardo (2018), dan Jansson et al. (2022), banyak pula penelitian menunjukkan bahwa dengan mengadopsi IFRS, perusahaan justru akan lebih bertindak maksimal dalam hal kualitas laporan keuangan sehingga akan mengurangi praktik manajemen laba demi kepentingan investor agar investor dapat melihat keadaan secara benar terkait dengan kondisi ekonomi suatu perusahaan (Marco et al., 2019). Sehingga diartikan bahwa dengan mengadopsi IFRS justru akan mengurangi manajemen laba.

Penelitian Lantto (2007) juga menghasilkan jawaban yang sama bahwa penurunan manajemen laba diakibatkan karena adanya adopsi IFRS. Dijelaskan lebih lanjut yakni dengan mengadopsi IFRS, laporan keuangan menjadi lebih relevan. Serta tidak mencerminkan kondisi yang dibuat-buat dan dapat diandalkan sehingga tidak adanya peningkatan praktik manajemen laba. Ketidakkonsistenan tersebut membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yakni Ukuran perusahaan, profitabilitas, *Win or Loss* dan *leverage*. Menurut Hedqvist et al. (2022), bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan, dimana perusahaan yang lebih besar secara alami memperoleh perhatian yang lebih besar dari publik sehingga dapat menyebabkan penurunan manipulasi pendapatan dan perilaku oportunistik. Menurut Watts & Zimmerman (1990) melalui hipotesis biaya politik bahwa perusahaan akan cenderung melaporkan laba yang lebih rendah untuk menghindari perhatian yang lebih besar yang biasanya diikuti dengan melaporkan laba yang lebih tinggi. Dan penelitian Zéghal et al. (2011), menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dan reabilitas laporan keuangan dan sebagai tambahan informasi, perusahaan besar

biasanya akan melaporkan lebih banyak informasi sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Variabel kontrol kedua yaitu profitabilitas. Rasio profitabilitas yang tinggi memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba, karena perusahaan yang berkinerja baik cenderung memiliki lebih banyak kualitas laporan keuangan. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Hedqvist et al. (2022), dimana semakin tinggi rasio profitabilitas maka akan mengurangi praktik manajemen laba. Selanjutnya, profitabilitas juga memiliki efek langsung pada harga saham (P. M. Healy & Wahlen, 1999) dengan demikian, mengendalikan rasio profitabilitas menjadi relevan ketika mengukur manajemen laba.

Variabel kontrol ketiga yaitu *win or loss*. Salah satu kekuatan pendorong manajemen laba adalah melaporkan keuntungan. Dimana perusahaan menggunakan manajemen laba untuk menghindari pelaporan laba yang negatif (rugi) atau adanya penurunan laba. Sejalan dengan Hedqvist et al. (2022), bahwa indikasi yang jelas tentang penggunaan manajemen laba adalah untuk menghindari pelaporan laba negatif (rugi) ataupun penurunan laba. Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa perusahaan yang menunjukkan kerugian atau penurunan laba dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seharusnya menunjukkan penggunaan manajemen laba untuk meningkatkan laba tahun ini.

Variabel kontrol keempat yaitu *leverage* yang diukur dengan *long term debt to total assets ratio* (LDAR). Menurut teori akuntansi positif diasumsikan bahwa terdapat insentif untuk kegiatan manajemen laba bagi perusahaan dengan *debt to Equity ratio* (DER) yang tinggi karena memberikan motivasi kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dengan cara membuat pendapatan keatas melalui metode akuntansi. Sehingga dalam penelitian ini, diyakini bahwa jumlah utang jangka panjang yang lebih tinggi akibat adanya kapitalisasi sewa akan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat terdapat perbedaan hasil penelitian, dikarenakan adanya perbedaan kriteria sampel serta asumsi yang digunakan oleh setiap peneliti. Karena hasil berbagai penelitian tersebut bervariasi tidak konsisten, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan tambahan

literatur terkait dengan pengaruh penerapan PSAK 73 yang dicerminkan melalui kapitalisasi sewa dalam hal ini mengadopsi IFRS khususnya adopsi IFRS 16 di Indonesia, karena belum ada penelitian terkait dengan dampak penerapan kapitalisasi sewa pada PSAK 73 terhadap manajemen laba di Indonesia.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan terhadap penelitian mengenai manajemen laba dengan perbedaan variabel yang digunakan yakni menggunakan penerapan kapitalisasi sewa pada PSAK 73. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pihak eksternal perusahaan mengenai praktik manajemen laba dikarenakan adanya penerapan PSAK 73 yang mana perusahaan diwajibkan untuk mengkapitalisasikan sewanya, sehingga hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi pihak eksternal dalam mengambil keputusan. Dan berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan dan kesenjangan hasil penelitian yang ada, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengacu pada penelitian terdahulu sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Kapitalisasi Sewa Terhadap Manajemen Laba**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta hasil penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh positif penerapan kapitalisasi sewa pada praktik manajemen laba?
- b. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan kapitalisasi sewa pada praktik manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh positif penerapan kapitalisasi sewa pada praktik manajemen laba.
- b. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan kapitalisasi sewa pada praktik manajemen laba.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

a. Aspek Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur khususnya literatur yang membahas mengenai PSAK 73 tentang Sewa.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Manajer Perusahaan

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi manajer dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pengimplementasian PSAK 73 akibat adanya dampak pada kinerja keuangan perusahaan sehingga strategi terhadap hal tersebut dapat segera dirumuskan.

2. Bagi Investor

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi investor dalam hal tambahan informasi mengenai sewa yang sesuai dengan PSAK 73 serta dapat juga mengetahui bagaimana praktik manajemen laba pada perusahaan setelah implementasi kapitalisasi sewa sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

3. Bagi Regulator

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi regulator khususnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sebagai pembuat standar dapat dijadikan referensi dalam mengevaluasi apakah standar yang diterapkan telah berdampak pada kualitas laporan keuangan.